

STRATEGI KOLABORATIF PENYELENGGARA PEMILU DAN UNIVERSITAS ISLAM DALAM MENANGKAL POLITIK UANG DAN POLITIK IDENTITAS

NADIRSAH HAWARI¹, AGUSTAM²

UIN Raden Intan Lampung

¹nadirsahhawari@radenintan.ac.id, ²dmstour68@gmail.com

Abstract

This study discusses the efforts of election management institutions in creating an educational and collaborative electoral process with UIN Raden Intan Lampung. The research is motivated by concerns among academics and political observers regarding the increasingly pragmatic political climate, often fragmented by symbols of religion, ethnicity, race, and social groups, including in Lampung. The research questions include the legal perspectives on identity politics and vote-buying practices, as well as the collaborative efforts between UIN Raden Intan Lampung and election management institutions to foster a conducive, fair, honest, and dignified democratic atmosphere during the election process, considering that Lampung is one of the provinces prone to vote-buying. This qualitative research employs structured interviews with key figures from the KPUD, Bawaslu, and UIN Raden Intan Lampung, along with field observations. The data is deeply analyzed using ex post facto analysis techniques. The findings reveal that identity politics is still utilized by candidates and their campaign teams to win elections, despite being contrary to election laws and potentially subject to criminal sanctions. The study also finds that UIN Raden Intan Lampung has established tangible collaborative partnerships with election management institutions through sustained cooperation between university leaders, faculties, and study programs, which have positively impacted the development of local democracy in Lampung.

Keywords : Collaboration, Election Management Institutions, UIN Raden Intan, Identity Politics, Vote-Buying



A. Introduction

Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di dunia dalam hal praktik demokrasi dengan berbagai dinamika pemilu yang mewarnainya. Namun, pada pemilu tahun 2024, masih ada banyak dinamika dan tantangan termasuk Lampung. *Trend* terbaru menunjukkan meningkatnya prevalensi politik identitas dan politik uang yang mengancam integritas proses demokrasi. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa 42% pemilih di Lampung percaya bahwa politik identitas memengaruhi pilihan mereka, dengan afiliasi agama sebagai faktor paling dominan.¹

Politik identitas, yang sering dipicu oleh afiliasi etnis, agama, atau daerah, dapat menciptakan perpecahan yang pada akhirnya mengarah pada masyarakat yang terfragmentasi. Di Lampung, di mana berbagai etnis seperti Lampung, Jawa, dan Sunda hidup berdampingan, manipulasi identitas untuk kepentingan elektoral semakin tampak. Selain itu, data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung menunjukkan bahwa sekitar 35% pemilih melaporkan bahwa mereka didekati dengan tawaran uang atau barang selama Pemilu 2019, yang menyoroti masalah politik uang yang terus berlanjut di wilayah ini. Situasi ini diperburuk oleh tantangan sosial ekonomi yang dihadapi banyak penduduk Lampung, di mana lebih dari 20% populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Kerentanan ekonomi ini membuat pemilih, terutama dari latar belakang sosial ekonomi rendah, rentan terhadap insentif moneter yang ditawarkan

¹ Admin, "Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024," n.d., 2, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu.



oleh kandidat politik, yang pada akhirnya menghasilkan hasil pemilu yang tidak mencerminkan kehendak sejati rakyat.²

Menyadari urgensi masalah ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan UIN Raden Intan Lampung telah memulai inisiatif kolaboratif untuk melawan praktik-praktik merugikan ini. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilih, mempromosikan perilaku pemilihan yang etis, dan mendorong partisipasi politik aktif. Dengan memanfaatkan sumber daya pendidikan dan keterlibatan masyarakat, kolaborasi ini berupaya menciptakan pemilih yang lebih terinformasi yang mampu menolak godaan politik identitas dan politik uang. Meskipun tantangan ini sangat krusial, penelitian mengenai strategi efektif untuk mengatasinya dalam konteks Lampung masih terbatas. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis upaya kolaboratif antara penyelenggara pemilu dan UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini akan menilai dampak strategi-strategi tersebut terhadap perilaku pemilih, tantangan yang dihadapi, dan potensi replikasi upaya ini di wilayah lain yang menghadapi masalah serupa. Dengan menyelidiki studi kasus lokal ini, diharapkan kajian ini dapat memberi berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang dinamika integritas pemilu dan membuka wawasan para pembuat kebijakan dan praktisi yang ingin memperkuat proses demokrasi. Temuan ini tidak hanya akan berdampak pada Lampung tetapi juga pada wilayah lain di Indonesia dan sekitarnya, di mana ancaman politik identitas dan politik uang terus merongrong tatanan demokrasi.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana politik identitas dan politik uang mengancam kualitas proses demokrasi dalam Pemilu 2024 di Lampung dan bagaimana perspektif hukum terhadap

² Jerry Indrawan dkk, "Ancaman Politik Identitas Bagi Pemilihan Umum Tahun 2024," *Al-Qistahas* 14, no. 1 (2023): 33.



praktik tersebut dan apa saja bentuk strategi kolaboratif antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan UIN Raden Intan Lampung, dan apakah sudah dinilai efektif untuk menangani masalah ini di Lampung. Penelitian ini mengaplikasikan Teori Mobilisasi Sosial yang dikemukakan oleh Charles Tilly, yang menjelaskan bagaimana kelompok dalam masyarakat dapat dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam proses politik. Mobilisasi sosial dapat difokuskan pada isu-isu spesifik, seperti pencegahan politik identitas dan politik uang. Teori ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa mobilisasi sosial dapat menganalisis bagaimana kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan UIN Raden Intan dapat memotivasi masyarakat untuk menolak praktik negatif dalam pemilu dan mendorong partisipasi politik yang lebih etis.³

Studi literatur mengungkap beberapa fakta menarik terkait tema *politics of identity* dan *buying-politics* dalam pemilu di Indonesia, khususnya saat Pemilu 2024. Pertama, ada telaah khusus mengenai pelanggaran kampanye, termasuk politik uang yang diriset oleh Dwi Lestari, Reny Herawaty, Siti Nuraeni, Yehezkiel Rizaldi, Elizabeth Chandra, Dony Saputra, dan Nabila Setya. Riset ini berjudul “Kolaborasi Masyarakat, Pemerintah, dan Aparat Penegak Hukum dalam Menekan Penyebaran Informasi Hoaks/Berita Palsu Menjelang Kampanye Pemilu 2024,” diterbitkan dalam *Jurnal Pendidikan Karakter Unggul*, Vol. 1 No. 4 Tahun 2023. Penelitian ini lahir dari keprihatinan peneliti terhadap bahaya berita bohong dan palsu yang kerap menyerang calon dan menjadi konsumsi publik.⁴ Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Sabila Riska dalam

³ Sisin Warini, Yasnita Nurul Hidayat, and Darul Ilmi, “Teori Belajar Sosial Dalam Pembelajaran,” *ANTHOR:Education and Learning Journal* 2, no. 4 (2023): 569, <https://doi.org/10.31004/anthor.v2i4.181>.

⁴ Dwi Lestari and Heni Herawati, “Kolaborasi Masyarakat, Pemerintah, Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Menekan Penyebaran Informasi Hoax/Berita Palsu Menjelang Kampanye Pemilu 2024,” *Pendidikan Karakter Unggul* 1, no. 4 (2023): 3.



risetnya berjudul “Peran dan Kolaborasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam Pengendalian Fluktuasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2019 sebagai Resolusi Rencana Pemilu 2024 Provinsi Bali,” yang diterbitkan dalam *Jurnal Ilmu Sosial (JIS)* Vol. 3 No. 1 Tahun 2023. Riska menilai pertumbuhan Indeks Demokrasi Indonesia yang semestinya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat ternyata tidak dapat dijadikan pijakan yang kuat. Ia menyoroti pentingnya upaya dini dan kerjasama antara lembaga pemerintah untuk meningkatkan level IDI, termasuk di Bali.⁵

Model riset kedua adalah penelitian umum mengenai tema politik identitas, baik dari sudut pandang diskursus teologis maupun praktik pragmatis, seperti yang dilakukan oleh Ridwan Wijayanto Said dalam riset berjudul “Fenomena Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia,” yang diterbitkan oleh *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023. Dalam riset ini, penulis menyoroti pandangan para ahli mengenai substansi dan penilaian akhir terhadap perilaku politik yang seringkali melibatkan identitas SARA, terutama isu keagamaan dalam politik praktis.⁶ Peneliti lain seperti Dinar Astuti, Andi Agustang, dan Idham Irwansyah Idrus berjudul “Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia,” yang diterbitkan oleh *SIBATIK JOURNAL*, Vol. 2 No. 6 Tahun 2023, membahas pro dan kontra mengenai politik identitas serta dampaknya dalam sebuah kontestasi.⁷ Lebih jauh, riset yang mengkaji Aksi 212 oleh Yusril Fahmi Adam berjudul “Islam dan Politik Identitas: Konflik

⁵ Sabila Riska and Vita Yuliawati, “Peran Dan Kolaborasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali Dalam Pengendalian Fluktuasi Indeks Demokrasi Indonesia (Idi) Tahun 2019 Sebagai Resolusi Rencana Pemilu 2024 Provinsi Bali,” *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023): 153.

⁶ Ridwan Wijayanto Said, “Fenomena Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia,” *Citizen* 3, no. 1 (2023): 233, <https://doi.org/10.53866/jimi.v3i1.233>.

⁷ Dinar Astuti and Idham Irwansyah Idrus, “Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia,” *Sibatik Jurnal* 2, no. 6 (2023): 1772, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888>.



pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia,” yang diterbitkan dalam *Jurnal Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2022, menemukan bahwa Gerakan 212 memiliki akar historis yang kuat dalam sejarah bangsa, sehingga tidak mudah diredam dan dapat kembali meluap kapan saja. Oleh karena itu, perlu ada upaya konstruktif dan kolaboratif dari semua pihak.⁸

Dari telaah beberapa riset terdahulu, terlihat adanya kegundahan dan keprihatinan mendalam dari para pemerhati dan praktisi politik, baik di dalam maupun luar negeri, terkait bahaya politik identitas dan biaya politik. Disisi berbeda, penelitian-penelitian yang lebih spesifik mengenai hal ini di lembaga pendidikan tinggi, khususnya kampus Islam, masih sangat terbatas. Hal ini penting mengingat pelanggaran etika dalam berdemokrasi, baik melalui isu politik identitas maupun biaya politik, berakar pada sikap dan moral identitas, yang merupakan pokok kajian dalam studi keislaman, terutama di perguruan tinggi Islam seperti UIN Lampung.

Selain menampakkan *gape* akademik, riset ini juga menunjukkan beberapa kebaruan (*novelty*) yang terletak pada eksplorasi strategi kolaboratif antara penyelenggara pemilu dan UIN Raden Intan Lampung dalam melawan politik identitas dan politik uang, yang menggabungkan pendekatan lokal berbasis nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan pendidikan. Dengan fokus pada konteks Pemilu Indonesia 2024, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam memberdayakan institusi pendidikan tinggi Islam sebagai mitra strategis dalam menciptakan pemilu yang lebih bersih dan demokratis, sekaligus menyediakan model kolaborasi yang dapat diadaptasi di daerah lain.

⁸ Yusril Fahmi Adam, “Islam Dan Politik Identitas: Konflik Pada Gerakan 212 Dalam Perspektif Sejarah Indonesia,” *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022): 4395, <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i2.4395>.



B. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam dan data empiris yang kuat serta valid. Desain penelitian yang dikembangkan oleh peneliti menggunakan pola studi kasus untuk menganalisis kolaborasi antara penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, dan DKPP, dengan UIN Raden Intan Lampung. Fokusnya adalah pada praktik, tantangan, dan hasil kolaborasi dalam konteks Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, terutama komisioner KPU, pejabat Bawaslu, Rektor, dosen dari UIN Raden Intan Lampung, termasuk tokoh masyarakat dan pemilih pemula. Wawancara ini bertujuan untuk menggali sejauhmana usaha mereka dalam mereduksi praktik politik identitas dan politik uang, serta efektivitas strategi kolaboratif yang dijalankan. Selain wawancara peneliti juga menggunakan teknik observasi, yang akan digunakan untuk memantau kegiatan kolaborasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan UIN Raden Intan, termasuk seminar, kampanye sosialisasi, dan kegiatan komunitas. Observasi ini akan memberikan konteks tambahan terkait implementasi strategi yang dilakukan.

C. Result and Discussion

Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih perwakilan di berbagai tingkat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (DPRD), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI). Selain itu, pemilihan ini juga mencakup pemilihan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Tiga pasangan calon bersaing dalam kontestasi ini: Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin



Iskandar (pasangan calon nomor 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (pasangan calon nomor 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (pasangan calon nomor 3), yang semuanya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) berdasarkan Keputusan Nomor 1632 Tahun 2023. Dengan lebih dari 200 juta pemilih terdaftar di seluruh Indonesia, kontestasi ini merupakan momen signifikan dalam sejarah demokrasi Indonesia.⁹

Sebelum mereka mendaftar ke kantor KPU RI, ketiga pasangan calon ini menghadapi berbagai isu politik, sosial, bahkan sentiman agama yang memengaruhi persepsi publik. Pasangan calon nomor 1, Anies-Muhaimin, menghadapi stigma terkait politik identitas dan politisasi agama, yang merujuk pada rekam jejak mereka saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dan dukungan dari kelompok-kelompok Islam seperti Aksi 212. Pasangan calon nomor 2, Prabowo-Gibran, dipandang sebagai simbol status quo dan dinasti politik, dengan Gibran yang dianggap terlalu muda dan kurang berpengalaman dalam menangani isu-isu nasional. Sementara itu, pasangan calon nomor 3, Ganjar-Mahfud, dianggap sebagai kelanjutan dari kebijakan partai yang berkuasa yang dinilai tidak pro-rakyat.¹⁰

Melalui tinjauan lebih mendalam, ketiga pasangan calon memiliki potensi untuk terlibat dalam politik identitas yang dapat memunculkan isu terkait etnisitas, agama, dan ras (SARA) dan menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat, meningkatkan risiko konflik diantara pendukung

⁹ Fitria Chusna Farisa, "Tiga Pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 Resmi Ditetapkan, Saatnya Adu Gagasan," <https://Nasional.Kompas.Com/>, November 14, 2023, 6, <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/14/05100041/tiga-pasangan-capres-cawapres-pemilu-2024-resmi-ditetapkan-saatnya-adu?page=all>.

¹⁰ Edy Arsyad, "Mantan Penyidik KPK Angkat Bicara Soal Nama Ganjar Yang Disebut-Sebut Di Sidang Kasus Korupsi E-KTP, Profesor Henri Subiakto: Fakta Harus Disampaikan Apa Adanya," <https://Fajar.Co.Id/>, Oktober 2022, 2, <https://fajar.co.id/2022/10/19/mantan-penyidik-kpk-angkat-bicara-soal-nama-ganjar-yang-disebut-sebut-di-sidang-kasus-korupsi-e-ktp-profesor-henri-subiakto-fakta-harus-disampaikan-apa-adanya/>.



fanatik, terutama di media sosial. Ada kegundahan dirasakan pengamat, praktisi, dan akademisi, termasuk Restu Hasanuddin karena pemilu 2024 diprediksi akan dipenuhi isu SARA, penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan politik identitas, yang diperparah oleh kehadiran "buzzer" yang aktif menyerang calon lawan. Analisis Jerry Indrawan menunjukkan bahwa politik identitas cenderung tumbuh di antara kelompok politik superior dan inferior serta dapat mengancam nasionalisme dan pluralisme, terutama dalam konteks hubungan mayoritas-minoritas.¹¹

Kekhawatiran yang diungkapkan oleh Hasanuddin dan Indrawan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture* pada tahun 2010. Dalam penelitian ini, Noorhaidi Hasan dan Irfan Abu Bakar menemukan 80% umat Muslim yang terpapar informasi Islam melalui media menganggap Islam sebagai bagian dari ekspresi etika dan budaya, sementara 20% lainnya cenderung ingin Islam menjadi ideologi politik. Meskipun angka 20% mungkin terlihat kecil, potensi politisasi agama tetap ada, terutama di media sosial yang cenderung longgar dan kurang terpantau. Fenomena ini sangat relevan di Lampung, di mana interaksi di media sosial sering kali dipenuhi dengan narasi yang memecah belah yang dapat memengaruhi keputusan pemilih dalam pemilu.¹²

Secara esensial, diskusi tentang politik identitas dan identitas politik bukanlah sesuatu yang disepakati. Perdebatan tentang hal ini jelas terlihat di antara para cendekiawan, pengamat politik, terutama mengenai hakikat dari politik identitas itu sendiri.¹³ Perbedaan pendapat muncul

¹¹ Taupik Hidayat, "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 863.

¹² Restu Hasanudin, dkk, "Pendekatan Kolaboratif Terkait Pencegahan Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Lemhanas RI* 11, no. 2 (2023): 102.

¹³ Askana Fikria Marsa Maya Arjuna, "Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024," *Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 1 (2023): 45.



karena identitas dalam kontestasi demokrasi tak terhindarkan, seperti penyebutan etnisitas, asal-usul, dan agama dalam proses pendaftaran dan berbagai tahap pemilu. Namun, dalam praktik, identitas berbasis etnis, agama, dan ras (SARA) sering kali digunakan sebagai senjata untuk menyerang lawan politik. Secara teoritis, Dinar Astuti menegaskan politik identitas berbeda dari identitas politik. Menurutnya, Identitas politik lebih menjurus pada posisi kepentingan aktor politik, manakala politik identitas lebih fokus pada upaya mengkapitalisasi identitas tertentu sebagai alat berpolitik. Sama dengan Astuti yang mengutip pandangan Lukmantoro bahwa politik identitas menekankan kepentingan anggota kelompok yang berbagi identitas atau karakteristik yang sama, baik berdasarkan etnis, agama, budaya, ataupun gender tertentu. Peneliti pada pendapat Lukmantoro bahwa politik identitas pada akhirnya akan bermuara pada kepentingan pragmatis ketika sudah berhadapan dengan realitas politik di lapangan.¹⁴

Istilah kolaborasi kerap digunakan dalam berbagai forum seperti seminar, dialog politik, *economic forum*, dan para trainer motivasi dalam kegiatan motivasi keluarga untuk membangun sinergi. Menurut Choirul Saleh, secara etimologis, kata kolaborasi (kerja sama) berasal dari kata *colaboratif* yang terdiri dari awalan *co* dan akar kata *labor*.¹⁵ Ketika digabungkan, arti yang disampaikan menunjukkan penyatuan usaha atau peningkatan kemampuan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kolaborasi didefinisikan sebagai bentuk proses sosial yang mencakup aktivitas-aktivitas tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama melalui saling bantuan dan pemahaman terhadap aktivitas masing-masing pihak. Dari penjelasan Saleh, jelas

¹⁴ Astuti and Irwansyah Idrus, "Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia," 1772.

¹⁵ Moh. Choirul Saleh, *MODUL 01 Konsep, Pengertian, Dan Tujuan Kolaborasi*, 01 6107 (Jakarta, 2121), 6, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6107-M1.pdf>.



bahwa kolaborasi merupakan suatu kesepakatan dan kebersamaan dalam satu tindakan untuk mencapai aspirasi bersama.¹⁶ Pandangan ini dikuatkan Dani Rahayu dan Supryitno, yang mengutip pendapat dari Wood dan Gray. Mereka menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses berpikir dari para aktor dengan mempertimbangkan berbagai aspek perbedaan dalam suatu masalah dan berusaha menemukan solusi aplikatif atas permasalahan tersebut. Kolaborasi sering digunakan untuk menggambarkan proses pemecahan pekerjaan yang melibatkan berbagai batasan, sektor, hubungan, atau bahkan antar negara. Menurut Dani, kolaborasi setidaknya memiliki tujuh karakteristik utama seperti partisipasi inklusif, akuntabilitas, tujuan yang jelas, berbagi pengetahuan, identifikasi dan pengujian berbagai pilihan yang tersedia, pembagian peran dan tanggung jawab, serta kesadaran akan perkembangan di antara semua anggota. Melalui karakteristik-karakteristik ini, Dani berupaya memperkuat apa yang dijelaskan oleh Saleh dengan menekankan ciri khas unik dari upaya kolaborasi.¹⁷ Sementara Nur Habibah menganalisis karakteristik kerja sama kolaboratif dan menyatakan bahwa kolaborasi tidak hanya tentang mencapai target, tetapi juga bahwa usaha sepihak tidak akan memberikan hasil maksimal. Ia sependapat dengan Sink, yang menegaskan kolaborasi adalah usaha di mana organisasi-organisasi dengan kepentingan terhadap suatu isu tertentu berusaha bersama untuk menemukan solusi guna mencapai tujuan yang tidak dapat tercapai secara individu. Ketika pihak-pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan sinergi seperti kepala sekolah, pegawai, guru, siswa, komite, orang tua,

¹⁶ Moh. Choirul Saleh, *MODUL 01 Konsep, Pengertian, Dan Tujuan Kolaborasi*, 01 6107 (Jakarta, 2121), 5, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6107-M1.pdf>.

¹⁷ Philianto Dani Rahayu and Suprayitno, "Kolaborasi Model Pentaahlelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Seigohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya," *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan* 10, no. 1 (2021): 21, <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/10589/5739>.



dan pihak terkait lainnya bekerja secara terpisah, jelas akan sulit untuk menemukan solusi yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Dari penjelasan Habibah, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai konteks, menggambarkan situasi di mana dua pihak atau lebih saling bekerja sama dengan pemahaman terhadap permasalahan masing-masing, dan berusaha membantu satu sama lain untuk menyelesaikan masalah secara bersama. Secara lebih spesifik, kolaborasi merujuk pada kerja sama intensif untuk mengatasi masalah yang dihadapi kedua belah pihak secara bersamaan.¹⁸

Secara umum, kolaborasi merupakan pola hubungan yang terbentuk antara individu atau organisasi yang ingin berbagi, berpartisipasi secara aktif, serta sepakat untuk melakukan usaha kolektif. Ini mencakup berbagi informasi, sumber daya, manfaat, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Pemahaman ini sejalan dengan definisi yang diajukan oleh Roschelle dan Teasley, yang menggambarkan kolaborasi sebagai keterlibatan bersama peserta dalam upaya yang terkoordinasi untuk memecahkan masalah bersama, seperti yang dikutip oleh Sangkut.¹⁹ Begitu pula, Reza mengutip pendapat Camarinha-Mathos dan Afsarmanesh yang menjelaskan kolaborasi melibatkan berbagai implikasi kerja sama, seperti lahirnya semangat kebersamaan dalam menghadapi problematika, manajemen risiko, pemenuhan kebutuhan sumber daya, serta tanggung jawab dan imbalan yang diharapkan oleh setiap anggota kelompok. Kebersamaan ini

¹⁸ Nur Habibah, "Membangun Kolaborasi Untuk Mewujudkan Sinergi Di SMP Negeri 3 Kesugihan," *Jurnal Pendidikan Islam: Dhabit* 3, no. 1 (2023): 44, <https://dhabit.web.id/index.php/dhabit/article/view/62/49>.

¹⁹ Septi Rindawati, Bella Astarika, and Sangkut Dwi Wulandari, "Pelatihan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Masa Pandemi," *JKB: Jurnal Kewirausahaan & Bisnis* 3, no. 2 (2021): 150, <https://jurnalunived.com/index.php/JKB/article/view/399/209>.



kemudian membentuk rasa atau identitas kolaborasi dan kerja sama di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, kolaborasi juga mencakup proses keterlibatan dan partisipasi bersama dari semua peserta untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi secara kolektif.²⁰ Dengan demikian, kolaborasi mengimplikasikan terciptanya saling percaya antara pihak-pihak yang bekerja sama dalam berbagai situasi, waktu, dan kesempatan, serta upaya dan dedikasi yang diberikan oleh setiap individu.²¹

Isu politik identitas bukanlah masalah sepele, terutama mengingat banyaknya kasus kekerasan atas nama agama, dan penguatan sentimen identitas agama dan etnis. Kampanye negatif dalam pemilu terus bermunculan dan sulit dibendung. Yang lebih memprihatinkan, situasi ini sering dimanfaatkan oleh elit politik tertentu yang memainkan peran penting dalam memperkuat identitas dan sentimen agama untuk meraih kekuasaan, khususnya menjelang tahun politik. Mengingat kontestasi Pilpres 2014 dan 2019, di mana polarisasi masyarakat sangat tajam, dampak dari politisasi agama dan stigmatisasi identitas agama tertentu dapat menjadi ancaman besar terhadap keutuhan kehidupan berbangsa yang telah terjalin dalam bingkai persatuan Indonesia.²²

Munculnya politik identitas Islam didorong oleh simbol-simbol agama yang diyakini dapat meningkatkan popularitas dan penerimaan dengan menggugah aspek emosional masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Osbin, yang mengutip penelitian Ramlan dan Kahmad serta temuan dari SMRC, yang jelas menyatakan bahwa pada tahun 2017, sekitar 20 juta

²⁰ Reza Mahdi, "Kolaborasi Perpustakaan Umum Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Masyarakat," *Media Informasi* 32, no. 2 (2023): 223, <https://journal.ugm.ac.id/v3/MI/article/view/6305/3718>.

²¹ Hasdjarjo Boedi Wibowo, "Kolaborasi Kreatif Dengan Prinsip Berbagi Manfaat Secara Etis Melalui Desain: Studi Kasus Program Inovatif Dan Kreatif Melalui Kolaborasi Nusantara (IKKON) – Badan Ekonomi Kreatif" (SENADA 2018 STD BALI, n.d.), 12.

²² Marsa Maya Arjuna, "Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024," 425.



pengikut isu khilafah ada di Indonesia. Meskipun angka ini bisa diperdebatkan dan tidak konstan, kenyataannya kecenderungan untuk menggunakan isu agama, keyakinan, dan etnis dalam politik sangat terlihat dan tidak bisa dianggap sepele.²³ Hal ini diperkuat lagi oleh Dinar Astuti, ia berpendapat bahwa proses demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari orientasi identitas, baik itu agama, gender, etnis, budaya, tradisi, atau antar kelompok. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi partai politik dalam pemilu sebelumnya.

Proses demokrasi, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilu nasional, sering kali tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan berbagai pihak dengan ideologi yang berbeda yang malah melemahkannya. Dalam konteks ini, berbagai bentuk identitas baik agama, gender, etnis, budaya, tradisi, atau antar kelompok sering digunakan sebagai alat politik.²⁴ Politik uang terdiri dari dua suku kata *money* yang berasal dari bahasa Inggris, yang berarti mata uang, dan *politic* yang mengacu pada kegiatan yang berkaitan dengan tujuan kekuasaan tertentu. Secara ringkas, politik uang atau politik moneter berkonotasi pada praktik penggunaan uang atau kekayaan material dalam proses politik baik untuk memengaruhi hasil pemilu, memperoleh dukungan politik, atau mempengaruhi keputusan politik. Praktik ini bisa mencakup pembelian suara, penyalahgunaan dana kampanye, atau korupsi yang berkaitan dengan aspek finansial dalam konteks politik. Menurut penelitian Khoiril dan Irwansyah, persentase pemilih yang terlibat dalam politik uang selama pemilu 2019 mencapai antara 19,4% hingga 33,1%. Angka-angka ini

²³ Osbin Samosir Indah Novitasari, "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024," *JIHHP* 2, no. 3 (2022): 342, <https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/2821/1482>.

²⁴ Astuti and Irwansyah Idrus, "Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia," 1772.



menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang terlibat dalam politik uang pada pemilu.

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia dalam hal ini, menurut studi yang dilakukan oleh The Latin American Public Opinion Project (LAPOP), Americas Barometer, dan Afrobarometer. Politik uang telah menjadi norma baru dalam pemilu Indonesia. Situasi ini semakin memburuk seiring dengan berjalannya proses pemilu 2024 termasuk pilkada, di mana, menurut Burhanuddin Muhtadi, toleransi terhadap politik uang dalam pemilu presiden dan legislatif 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu 2019.²⁵

1. Politik Identitas dan Money Politik Persepektif Hukum dan Strategi Kolaborasi UIN Raden Intan Lampung dan Penyelenggara Pemilu

Kerentanan Pemilu 2024 tidak hanya disebabkan oleh isu SARA, tetapi juga diperburuk lagi dengan adanya upaya terstruktur serta masif dari paslon dan pendukung tertentu yang berusaha memenangkan calon pilihannya dengan memanfaatkan kekuasaan serta dukungan dari konglomerat dan pengusaha. Penelitian yang dilakukan oleh Nadirsah mengenai kampanye cerdas dalam praktik demokrasi lokal pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Lampung sangat rentan terhadap praktik biaya politik (suap pemilu).²⁶ Temuan ini semakin diperkuat oleh rilis dari Bawaslu RI, yang menyatakan bahwa Provinsi Lampung menduduki peringkat kedua dengan risiko tinggi terhadap politik uang, dengan indeks kerentanannya sebesar 55,56, setelah Maluku Utara yang memiliki indeks kerentanan sebesar

²⁵ Khoiril Fadhilah and Irwansyah, "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9 (2023): 238, <http://dx.doi.org/10.29210/02020344>.

²⁶ Nadirsah Hawari, Muntaha Artalim, and Agustam, "Smart Campaign in Local Democracy Practices and Theory of Maqashid Sharia," *AnalisisL Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 291, <https://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v22i2.14336>.



100.²⁷ Situasi ini memerlukan perhatian serius, karena praktik politik uang dapat merusak kualitas demokrasi itu sendiri. Penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, perlu bertindak cepat untuk memantau dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi Islam, MUI (Majelis Ulama Indonesia), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), serta universitas dan lembaga sosial-politik lainnya. Menurut Askana, salah satu langkah yang diperlukan untuk mengatasi politik identitas pada Pemilu 2024 adalah dengan mengurangi politik identitas yang merusak. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada penyelenggara pemilu, tetapi juga pada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Di Indonesia, politik uang dan politik identitas merupakan dua praktik yang dilarang dalam pemilu karena dianggap merugikan demokrasi dan menciptakan persaingan yang tidak adil dalam dunia politik. Larangan terhadap politik uang mengacu pada praktik memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Praktik ini diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Juga Pasal 515 UU Pemilu menyatakan bahwa memberikan uang atau hadiah lain kepada pemilih untuk memengaruhi hasil pemilu adalah tindak pidana. Pelanggar dapat dihukum dengan penjara hingga tiga tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp 36 juta. Selain itu, Pasal 523 UU Pemilu mengatur larangan bagi peserta pemilu, tim kampanye, dan pihak lain untuk memberikan uang atau barang kepada pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama periode kampanye atau pada hari pemilu.

²⁷ Asrul Septian Malik, "Bawaslu Lampung Mitigasi Politik Uang," <https://M.Lampost.Co>, n.d., 3.



Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dihukum dengan penjara hingga empat tahun dan denda maksimal sebesar Rp 48 juta.²⁸

Larangan politik identitas merujuk pada strategi politik yang menggunakan faktor-faktor seperti etnisitas, agama, ras, dan kelompok (SARA) untuk memperoleh dukungan. Meskipun istilah "politik identitas" tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, praktik ini diatur melalui larangan terhadap tindakan diskriminatif atau ujaran kebencian yang berbasis SARA. Beberapa pasal yang relevan antara lain; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat (1) huruf c, yang melarang peserta pemilu menggunakan isu SARA dalam kampanye. Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis, yang melarang segala bentuk diskriminasi atau tindakan yang menyinggung ras dan etnis tertentu dalam konteks politik. Juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (2), yang melarang penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA di media digital. Pelanggar dapat dihukum penjara hingga enam tahun dan denda hingga Rp 1 miliar.²⁹

Kedua praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan persaingan yang adil dalam pemilu. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, baik pidana maupun finansial. Pasal 22E UUD 1945 menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yang menyatakan bahwa pemilihan umum (pemilu) harus

²⁸ Tifa Fauziah, "Isi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Link Download PDF," *Tirto.Id*, January 11, 2023, 4, <https://tirto.id/isi-uu-no-7-tahun-2017-tentang-pemilu-dan-link-download-pdf-gAui>.

²⁹ Fauziah, 5.



dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Selain itu, pemilu diatur oleh undang-undang yang ditetapkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama dengan pemerintah, yang kemudian dilaksanakan melalui peraturan dan lembaga-lembaga terkait seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Pasal-pasal lain dalam UUD 1945 juga berkaitan dengan sistem pemerintahan dan pemilu, seperti Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Pasal 6A yang mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, dan Pasal 19 yang mengatur pemilihan anggota DPR.

Terdapat empat elemen yang terlibat dalam menjalin kerja sama antara Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keempat elemen tersebut adalah: pertama, pimpinan UIN yang diwakili oleh Rektor dan jajaran Wakil Rektor; kedua, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang diwakili oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI); ketiga, Fakultas Syariah dan Hukum yang diwakili oleh Program Studi Hukum Tata Negara (HTN); dan keempat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang diwakili oleh Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Selain itu, kerja sama ini juga melibatkan dosen UIN yang aktif dalam berbagai lembaga, organisasi massa, dan organisasi keagamaan, seperti MUI, FKUB, ICMI, Muhammadiyah, dan NU, untuk menciptakan suasana pemilu yang kondusif di Lampung. Keterlibatan komunitas akademik UIN Raden Intan Lampung dalam mendidik masyarakat tentang



pemilu, baik secara institusional maupun individu, sangat jelas terlihat dan sejalan dengan tugas utama mereka. Hal ini juga sejalan dengan visi besar UIN Raden Intan, yang mencerminkan perspektif peka terhadap lingkungan, di mana salah satu dimensi lingkungan mencakup sosial, politik, dan budaya sekitar.

2. Kolaborasi Pimpinan UIN Lampung dan Penyelenggara Pemilu

Salah satu bentuk kolaborasi UIN Raden Intan Lampung dalam mendukung kesuksesan Pemilu 2024 adalah dengan menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga penyelenggara pemilu, seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dari UIN Raden Intan Lampung untuk berkontribusi dalam proses kontestasi demokrasi diwujudkan oleh Rektor UIN Raden Intan Lampung melalui penandatanganan nota kesepahaman mengenai tri dharma perguruan tinggi dengan pimpinan DKPP RI di UIN Raden Intan Lampung pada 11 Mei 2023. MoU ini tercatat dengan nomor 007/MOU.DKPP/V/2023 dan B-1987/Un.16/R/HM.01/05/2023. Dalam sambutannya, Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, menekankan pentingnya Pemilu Serentak 2024 yang harus dijalankan dengan kesungguhan, dan DKPP sangat berharap pada partisipasi masyarakat dalam proses ini. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Wan Jamaluddin, menyampaikan kebanggaannya atas kolaborasi ini dan menegaskan bahwa keluarga besar UIN Raden Intan Lampung siap mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu.³⁰ Selain MoU dengan DKPP, UIN Raden Intan Lampung juga berkolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan acara doa bersama

³⁰ Anis Handayani, "Siap Sukseskan Pemilu Berintegritas, UIN Dan DKPP RI Teken MoU," *Radenintan.Ac.Id*, Mei 2023, 1, <https://kerjasama.radenintan.ac.id/siap-sukseskan-pemilu-berintegritas-uin-dan-dkpp-ri-teken-mou/>.



antaragama. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang aman, harmonis, dan damai, dengan tema "Melalui Doa Tulus, Kita Menciptakan Pemilu Bermartabat Menuju Indonesia Raya", yang diadakan pada Kamis, 7 Desember 2023. Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Bawaslu, KPUD, FKUB Lampung, serta komunitas akademik UIN Raden Intan Lampung. Dalam acara tersebut, Bapak Tamri, salah satu komisioner Bawaslu Lampung, menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan bahwa acara ini merupakan bentuk kesadaran masyarakat sebagai warga beragama dan warga negara yang bertanggung jawab, serta menegaskan bahwa keberhasilan pemilu sangat bergantung pada ketulusan dalam pelaksanaannya, serta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketua FKUB Provinsi Lampung, Moh. Bahrudin, juga menambahkan bahwa upaya yang dilakukan dengan tulus akan menghasilkan pemilih yang memiliki integritas, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Secara bersama, kita meyakini bahwa doa yang dilakukan dengan ketulusan dan pengabdian akan membawa berkah dan keberhasilan, bukan hanya berdasarkan jumlah tetapi juga pada niat yang tulus.³¹

3. Kolaborasi UIN Lampung dan Penyelenggara Pemilu Melalui Fakultas dan Dosen

Setidaknya ada tiga fakultas di UIN Raden Intan Lampung yang telah menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan penyelenggara pemilu, baik dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Fakultas-fakultas tersebut antara lain Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA), Fakultas Dakwah dan

³¹ Anis Handayani, "Gandeng FKUB, UIN RIL Selenggarakan TOT Penguatan Moderasi Beragama," *Radenintan.Ac. Id*, March 5, 2024, 3, <https://www.radenintan.ac.id/gandeng-fkub-uin-ril-selenggarakan-tot-penguatan-moderasi-beragama/>.



Komunikasi (FDK), serta Fakultas Syariah dan Hukum (FSH). Kerja sama ini melibatkan program studi yang relevan, yaitu Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), dan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI).

Salah satu bentuk konkret kolaborasi antara UIN Raden Intan Lampung dan penyelenggara pemilu adalah upaya Fakultas Ushuluddin dan Studi Keislaman dalam menjalin kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan kedua belah pihak, khususnya dalam tri dharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (MoA) antara kedua institusi berlangsung di Wiz Prime Hotel Lampung, Auditorium Lantai 3, pada pertemuan kunjungan dan koordinasi yang dihadiri oleh Komisioner Dody Afrianto dari KPU Kabupaten Pesawaran. Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Rian Armando, menyambut baik pelaksanaan kerja sama ini yang berlangsung pada Selasa, 28 Februari 2023. Kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan UIN Raden Intan Lampung berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan dengan tujuan mempererat hubungan kerja sama di masa depan. Pada kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Keislaman, Ahmad Isnaeni, menyampaikan rasa hormatnya atas upaya kolaboratif ini, dan berharap kerja sama ini dapat berlanjut demi kemajuan kedua institusi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Riswanto,



Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam, Abd. Qohar, serta perwakilan Panwaslu dari 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran.³²

Selain kerja sama dengan Bawaslu, Program Studi Pemikiran Politik Islam juga menjalin kolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung melalui program magang mahasiswa di KPU Provinsi. Dalam acara pelepasan mahasiswa magang, Abd. Qohar, Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam, bersama beberapa dosen seperti Bapak Gesit Yudha, hadir untuk mendampingi mahasiswa. KPU Provinsi Lampung diwakili oleh salah satu komisionernya, Bapak Ali Sidik. Dalam sambutannya, Abd. Qohar menekankan bahwa kegiatan magang ini memberikan wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa mengenai proses pelaksanaan pemilu, yang merupakan persiapan penting untuk memahami sistem pemilu dan demokrasi. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari kolaborasi antara UIN Raden Intan Lampung dan KPU Provinsi Lampung, yang diharapkan dapat memperkuat peran akademis UIN dalam mendukung dan memperkuat institusi penyelenggara pemilu.³³

Bentuk kolaborasi lainnya yang telah dilakukan oleh Fakultas Ushuluddin dan Studi Keislaman dengan lembaga penyelenggara pemilu termasuk praktik studi lapangan, magang, serta program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dijalankan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam. Dalam salah satu kunjungan

³² Gesit Yudha, "Perkuat Tridharma Perguruan Tinggi, FUSA Jalin Kerjasama Dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran," <https://Ppi.Ushuluddin.Radenintan.Ac.Id/>, March 7, 2023, 4, <https://ppi.usnuluddin.radenintan.ac.id/2023/03/07/perkuat-tridharma-perguruan-tinggi-fusa-jalin-kerjasama-dengan-bawaslu-kabupaten-pesawaran/>.

³³ Admin, "Sosialisasi Pemilu 2024 Dan Bahaya Money Politics," September 16, 2022, 3, <https://ppi.usnuluddin.radenintan.ac.id/2022/09/17/sosialisasi-pemilu-2024-dan-bahaya-money-politics/>.



magang mahasiswa ke Bawaslu Lampung, mahasiswa disambut oleh para pimpinan Bawaslu, Suheri dan Hamid Badrul Munir. Hamid Badrul Munir menekankan peran penting ketiga lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Beliau juga menjelaskan kontribusi yang dapat diberikan mahasiswa dalam Pemilu 2024, seperti memantau tahapan pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Ricky Ardian, staf Bawaslu Lampung, menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya memiliki tugas pengawasan, tetapi juga berperan dalam pencegahan dan sosialisasi mengenai pelanggaran pemilu.³⁴

Selain melibatkan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, upaya kolaborasi UIN Raden Intan Lampung juga melibatkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), yang menjalin kerja sama dengan Bawaslu Lampung. Dalam kolaborasi ini, enam mahasiswa dikirim untuk magang selama 44 hari. Proses penarikan mahasiswa magang dipimpin langsung oleh dosen KPI, Bapak Nasrul Efendi, dan diwakili oleh Bapak Dwi Hendro Nugro dari Bawaslu Lampung. Pada acara penarikan mahasiswa magang, Nasrul Efendi menyampaikan rasa terima kasih kepada Bawaslu atas kesempatan yang diberikan dan meminta maaf atas segala kekurangan serta perilaku mahasiswa selama menjalani magang di kantor Bawaslu. Nasrul menambahkan bahwa meskipun Generasi Z memiliki potensi besar, mereka masih memerlukan bimbingan, terutama dalam hal disiplin dan etika kerja. Dalam sambutannya, Dwi Hendro Nugroho juga menyampaikan rasa

³⁴ Gesit Yudha, "Penarikan Mahasiswa PKL Program Studi Pemikiran Politik Islam Pada KPU Kota Bandar Lampung," <https://Ppi.Ushuluddin.Radenintan.Ac.Id/>, March 2, 2023, 5, <https://ppi.usnuluddin.radenintan.ac.id/2023/03/02/penarikan-mahasiswa-pkl-program-studi-pemikiran-politik-islam-pada-kpu-provinsi-lampung/>.



terima kasih dan salam hormat kepada pimpinan UIN Raden Intan Lampung, serta mengapresiasi partisipasi mahasiswa dalam program magang ini.³⁵

Fakultas Syariah dan Hukum juga turut berperan aktif dalam kolaborasi ini. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) yang secara eksplisit menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan berbagai institusi, baik domestik maupun internasional, guna mencapai keunggulan dalam tridharma perguruan tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Prodi HTN telah menjalin kerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) untuk mengadakan diskusi publik yang bertujuan mengantisipasi Pemilu Serentak 2024. Diskusi ini diselenggarakan di gedung Fakultas pada Selasa, 16 Juli 2024, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan penyelenggaraan pemilu. Diskusi dengan tema menilai kualitas demokrasi menuju pemilu serentak 2024 dimoderatori oleh Tin Amalia Fitri. Hadir dalam acara tersebut Ketua AIPI Pusat dan mantan DKPP Alfitra Salam, Komisioner KPU Lampung Antoniyus, Sekretaris Prodi HTN Fathul Mu'in, serta Ketua AIPI Lampung Agus Mardihartono. Turut hadir dalam diskusi ini Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Efa Rodiah Nur. Dalam sambutannya dia menyatakan acara ini merupakan respons terhadap dinamika hukum dan sosial menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Dalam konteks ini, kampus sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi untuk perbaikan sistem. Alfitra Salam, dalam sambutannya, menyoroti

³⁵ Lampung Lampung, "Lepas Mahasiswa PKL UIN Raden Intan, Bawaslu Lampung Berpesan Tetap Selalu Awasi Pemilu 2024," <https://Lampung.Bawaslu.Go.Id5> Feb, February 5, 2024, 6, <https://Lampung.Bawaslu.Go.Id/>, February 5, 2024, 7, <https://lampung.bawaslu.go.id/lepas-mahasiswa-pkl-uin-raden-intan-bawaslu-lampung-berpesan-tetap-selalu-awasi-pemilu-2024/>.



berbagai tantangan yang dihadapi pilkada serentak, salah satunya terkait dengan kelanjutan dari Pilpres. Ia juga menegaskan bahwa pilkada serentak tahun ini akan menjadi parameter dan persiapan untuk Pemilu 2029. Sekretaris Prodi HTN, Fathul Mu'in, menambahkan bahwa kunci sukses pilkada serentak melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP). Penyelenggara pemilu harus menjaga netralitas dan kode etik, sementara partai politik, masyarakat pemilih, dan media massa juga memiliki peran penting dalam mewujudkan pilkada yang jujur dan adil (luber dan jurdil).³⁶

Geliat kerja sama dan kolaborasi antara unit-unit kerja di UIN Raden Intan Lampung dalam menciptakan suasana pemilu yang kondusif dan bermartabat terus digalakkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) melalui kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, yang melibatkan sejumlah mahasiswa. Ketua Prodi HTN, Frengki, menyatakan bahwa tujuan utama dari kegiatan PKL ini adalah memberikan pencerahan kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan pesta demokrasi dan mendorong mereka untuk terlibat secara aktif, selain sebagai ajang praktik nyata dari pengetahuan yang telah diperoleh.³⁷

Keterlibatan fakultas dalam kolaborasi pemilu bersama penyelenggara pemilu di Provinsi Lampung tidak hanya terbatas pada aktivitas mahasiswa dalam kegiatan pengabdian dan praktik kuliah lapangan, tetapi juga melibatkan dosen yang memiliki kualifikasi. Sebagai contoh, dua dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN

³⁶ Muin, Kerjasama Prodi HTN Fakultas Syari'ah, Wawancara, November 29, 2023, 5.

³⁷ Fathul Muin, "Mahasiswa HTN Ikut Sukseskan Tahapan Pemilu Bersama Bawaslu," <https://htn.syariah.radenintan.ac.id/>, April 13, 2023, 4, <https://htn.syariah.radenintan.ac.id/>.



Raden Intan Lampung, Erina Pane dan Fathul Mu'in, mendorong organisasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menyukseskan pemilu tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan mereka sebagai narasumber dalam diskusi yang digelar oleh KPU Bandar Lampung bersama perwakilan organisasi masyarakat (ormas) se-Bandar Lampung di Kafe Xo Stars Coffee pada hari Rabu, 14 Desember 2022. Dalam paparan tersebut, Fathul Mu'in menjelaskan bahwa pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, melainkan merupakan hajat bersama. Ia menyoroti pentingnya pembagian kekuasaan atau konsep trias politika, yang mencakup kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana dua kekuasaan eksekutif dan legislatif dipilih melalui pemilu. Kunci keberhasilan pemilu terletak pada penyelenggara pemilu, partai politik, regulasi, dan pemilih. Erina Pane juga menegaskan bahwa organisasi masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam negara demokrasi, bahkan menjadi salah satu pilar untuk terwujudnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan.³⁸

Selain upaya kolaborasi kelembagaan yang digagas oleh UIN Raden Intan Lampung bersama penyelenggara pemilu, universitas ini juga menunjukkan komitmennya melalui kontribusi maksimal dari dosen-dosennya yang terus berkiprah di bidang sosial, budaya, dan lembaga keagamaan. Dosen-dosen UIN Raden Intan Lampung aktif terlibat dalam berbagai persoalan bangsa, salah satunya adalah edukasi politik bagi warga Lampung. Keterlibatan ini tampak melalui partisipasi aktif dalam organisasi keumatan, keagamaan, dan ormas yang melibatkan dosen serta civitas akademika UIN Lampung.

³⁸ Fathul Mu'in, "Dua Dosen HTN Jadi Narasumber Pendidikan Politik KPU Bandar Lampung," <https://htn.syariah.radenintan.ac.id/>, Desember 2022, 3, <https://htn.syariah.radenintan.ac.id/>.



Beberapa ormas yang melibatkan dosen-dosen UIN Raden Intan Lampung antara lain: Nahdlatul Ulama (NU) Wilayah Lampung (PWNU), Muhammadiyah Wilayah Lampung (PWM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Lampung, dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Lampung.

Jejak digital Moh. Mukri, salah satu dosen senior dan mantan Rektor UIN Raden Intan Lampung (2011–2021), sarat dengan aktivitas sosial-politik yang disampaikannya dalam berbagai forum, terutama melalui lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung. Terbaru, beliau pernah menggagas forum silaturahmi alim ulama se provinsi Lampung untuk menyatukan visi mengenai dinamika politik lokal saat itu. Kegiatan silaturahmi digelar di Hotel Novotel pada tanggal 1 Agustus 2024. Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan sikap terkait dinamika Pilkada di Lampung yang ditandatangani Ketua Umum MUI Lampung, Moh. Mukri bersama Ketua MUI dari 15 kabupaten/kota se provinsi Lampung. Dalam deklarasi tersebut, mereka menegaskan penolakan keras terhadap praktik money politics yang merusak nilai demokrasi dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kejujuran dalam Islam. MUI juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak pada 27 November 2024, dengan pertimbangan rasional dan moral, bukan berdasarkan iming-iming materi atau janji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, MUI mengimbau warga dan calon untuk menggunakan hak pilih secara sehat dan beretika, menolak kampanye hitam, serta selektif dalam menerima informasi politik.³⁹

³⁹ Muhammad Faizin, “Inilah 9 Poin Pernyataan Sikap MUI Lampung Tentang Pilkada Serentak 2024 Sumber: <https://Arina.id/Berita/Ar-1ZEEA/Inilah-9-Poin-Pernyataan-Sikap-Mui-Lampung-Tentang-Pilkada-Serentak-2024>,” <https://Arina.id/Berita/>, Agustus 2024, 3, Sumber:



Salah satu sosok dosen UIN Raden Intan Lampung adalah Prof. Dr. Sudarman, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah Wilayah Lampung (PW), menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kualitas demokrasi di Lampung. Dalam kunjungan silaturahmi dengan Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Selasa, 6 Agustus 2024, Sudarman menekankan pentingnya peran Muhammadiyah dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Ia mengungkapkan komitmen Muhammadiyah untuk menciptakan Pilkada yang damai, aman, nyaman, dan berkeadilan. Pj. Gubernur Samsudin mengapresiasi komitmen Muhammadiyah tersebut dan menekankan pentingnya silaturahmi serta komunikasi dengan tokoh agama, sesuai dengan arahan Presiden dan Mendagri saat pelantikannya. Samsudin juga memuji kontribusi Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Lampung, dengan banyaknya sekolah dan pesantren yang dimiliki oleh organisasi tersebut, yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung.⁴⁰

Keterlibatan UIN Raden Intan Lampung dalam mencerdaskan kehidupan politik di Provinsi Lampung, baik dalam proses kontestasi nasional maupun daerah, bukanlah klaim sepihak. Hal ini juga diakui oleh para pimpinan lembaga penyelenggara pemilu. Hasil analisis data primer yang dihimpun oleh peneliti menunjukkan bahwa UIN berada di garda depan, baik secara kelembagaan maupun kultur akademis. Bapak Tamri, yang diwawancarai oleh peneliti, mengakui peran tersebut dan berharap agar UIN Raden Intan terus berkontribusi,

<https://arina.id/berita/ar-1ZEEA/inilah-9-poin-pernyataan-sikap-mui-lampung-tentang-pilkada-serentak-2024>.

⁴⁰ Ariyadi Ahmad, "Muhammadiyah Tegaskan Komitmen Terlibat Aktif Ciptakan Pilkada Damai," <https://Pembaruan.id/>, Agustus 2024, 2, <https://pembaruan.id/agama/muhammadiyah-tegaskan-komitmen-terlibat-aktif-ciptakan-pilkada-damai/>.



mengingat Lampung merupakan provinsi kedua dengan kerawanan pemilu terbanyak setelah Maluku Utara. Menurut Tamri, praktik politik uang pada Pemilu 2024 diperkirakan akan berulang seperti pada Pemilu 2019, di mana terdapat tujuh bentuk pelanggaran pemilu yang sudah diputuskan oleh penegak hukum. Dalam wawancaranya, Tamri menjelaskan bahwa praktik politik uang merata di seluruh Lampung tanpa memandang daerah. Di Metro, meskipun tidak terjadi praktik politik uang yang masif, tingginya harga kursi menjadi isu karena jumlah pemilih yang sedikit. Persentase daerah yang rawan politik uang merata, dengan Lampung Timur menjadi salah satu yang paling banyak kasusnya, di mana dua dari tujuh kasus yang sudah divonis berasal dari daerah tersebut. Sementara itu, Way Kanan dicatat sebagai daerah yang paling bersih, dan Mesuji mengalami keterlibatan aparat desa dalam praktik politik uang ini.⁴¹

Selain mengumpulkan data di kantor Bawaslu Provinsi Lampung, peneliti juga mewawancarai Ibu Titik Sutriningsih, salah satu Komisioner KPU Provinsi Lampung. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu di Lampung secara umum semakin membaik dari tahun ke tahun, meskipun provinsi ini memiliki potensi masalah yang dapat berkembang dari hal-hal kecil. Ia mencatat bahwa masyarakat, baik yang terdidik maupun yang awam, semakin cerdas dalam memahami pelaksanaan pemilu. KPUD telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan ormas, termasuk UIN Raden Intan Lampung. Dengan keterbatasan anggaran, mereka berusaha menjangkau berbagai kalangan, termasuk pemula, pemuda, perempuan,

⁴¹ Tamri, Kolaboratif Effort Penyelenggara Pemilu dan UIN Raden Intan Lampung, Dialog, July 26, 2024, 1.



penyandang disabilitas, kelompok tani, dan arisan, sering kali dengan menumpang dalam kegiatan mereka.⁴²

Dari telaah mendalam terhadap semua data primer dan sekunder yang dihimpun, peneliti menyimpulkan bahwa secara faktual, UIN Raden Intan Lampung sebagai institusi pendidikan Islam berkontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa, termasuk dalam bidang politik dan demokrasi. Keikutsertaan UIN dalam mencerdaskan kehidupan politik di Provinsi Lampung dapat dilihat dari tiga aspek penting: kerjasama di level pimpinan Rektorat, Fakultas dan keterlibatan tenaga pendidik profesional UIN yang aktif di berbagai ormas keagamaan dan profesi. Keterlibatan UIN dalam kolaborasi dengan penyelenggara pemilu telah terkonfirmasi secara faktual dan diakui dalam dokumen kerjasama serta secara lisan oleh pimpinan lembaga penyelenggara pemilu. Selain juga berhasil memberi warga tersendiri dalam proses pelaksanaan pemilu 2024 yang dirasa lebih aman, bersih dan jauh dari isu polarisasi dan politik identitas yang sangat tajam seperti tahun politik sebelumnya.

Selain menemukan beberapa temuan penting diatas, hasil riset juga mendapati bahwa gema poliitk identitas pada pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilu Presiden/Wakil Presiden tidak sekuat pada pemilu tahun 2014 dan 2019 silam seperti yang diakui oleh mantan Ketua KPU Lampung Erwan Bustami. Pendapat Bustami juga diperkuat hasil riset Badan Riset Nasional (BRIN) yang secara tegas menyatakan politik identitas pada pilpres 2024 seperti sedang tidur.⁴³ Namun begitu, peneliti tidak menolak tanggapan beberapa pengamat

⁴² Titik Sutringisih, Kolaboratif Effort Penyelenggara Pemilu dan UIN Raden Intan Lampung, Dialog, Agustus 2024, 4.

⁴³ Sugiharto Purnama, "BRIN Sebut Politik Identitas Sedang Tidur Di Pemilu 2024," <https://Lampung.AntaraneWS.Com/>, January 16, 2024, 3.



politik lokal Lampung yang masih meyakini potensi politik identitas di Provinsi Lampung masih cukup kuat, walaupun ini hanya sebatas potensi yang tidak selalu menjadi kenyataan. Kiprah UIN Raden Intan Lampung bersama KPUD, Bawslu, DKPP dan ormas keagamaan di Lampung menjadi tameng terdepan dalam upaya mewujudkan pemilu yang bersih dari praktik menyimpang dalam kontestasi demokrasi lokal.⁴⁴

D. Conclusion

Sejatinya praktik politik identitas dan politik uang merupakan dua perilaku menyimpang dalam kegiatan politik baik yang dilakukan secara personal maupun kelompok tertentu. Cara kampanye seperti ini jelas mencederai kehormatan demokrasi dan bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi norma JURDIL dan LUBER bahkan telah melanggar banyak pasal dalam konstitusi dan perundangan pemilu yang ada di Indonesia. Hal ini tentu tidak bisa dianggap enteng dan sepele mengingat Indonesia adalah salah satu contoh negara dengan praktik demokrasi percontohan dunia. Oleh karena itu perlu ada upaya kongkrit dari para akademisi, pengamat politik, elit partai dan penguasa untuk menciptakan suasana kondusif dan sejalan dengan prinsipberdemokrasi yang baik.

Kolaborasi antara penyelenggara pemilu seperti KPUD, Bawaslu dan DKPP Lampung dengan lembaga pendidikan tinggi seperti UIN Raden Intan Lampung menunjukkan ada upaya sungguh dan bersama untuk melawan politik identitas dan politik uang pada Pemilu 2024 dengan beberapa langkah-langkah strategis baik yang dilakukan secara

⁴⁴ Tama Wiguna, "Potensi Politik Identitas Bayangi Pemilu 2024 Di Lampung," <https://Lampung.Idntimes.Com>, November 7, 2024, 3, <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/potensi-politik-identitas-bayangi-pemilu-2024-di-lampung>.



kelembagaan dibawah naungan kerjasama berupa MoU, MoA dan kegiatan bersama maupun yang dilakukan secara personal oleh dosen berupa kegiatan pengabdian masyarakat maupun riset ilmiah.

Hasil dari proses kolaborasi antara Penyelenggara Pemilu di Provinsi Lampung dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung telah memberikan dampak yang baik dalam mengedukasi warga Lampung dalam menyalurkan aspirasi politik mereka. Hal ini terlihat dari semakin menimnya temuan praktik politik identitas dan politik uang yang dilakukan oleh oknum politisi atau tim sukses dalam kontestasi pemilu tahun 2024 silam.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa UIN Raden Intan Lampung dan Lembaga Penyelenggara Pemilu tidak hanya sekedar berwacana dalam membangun kerjasama namun keduanya sudah berusaha secara padu dan konsisten untuk memberi kontribusi positif bagi perkembangan kehidupan politik. Bagi UIN Raden Intan Lampung, kolaborasi ini bukan sekedar panggilan sosial dalam bingkai teori mobilisasi sosial semata namun ini adalah bagian dari upaya sungguh untuk memastikan corak filosofi *Islam rahmatan lil'alam*.



References

- Adam, Yusril Fahmi. "Islam Dan Politik Identitas: Konflik Pada Gerakan 212 Dalam Perspektif Sejarah Indonesia." *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i2.4395>.
- Admin. "Sosialisasi Pemilu 2024 Dan Bahaya Money Politics," September 16, 2022. <https://ppi.usnuluddin.radenintan.ac.id/2022/09/17/sosialisasi-pemilu-2024-dan-bahaya-money-politics/>.
- — —. "Tahapan Dan Jadwal Peyelenggaraan Pemilu Tahun 2024," n.d. https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu.
- Ahmad, Ariyadi. "Muhammadiyah Tegaskan Komitmen Terlibat Aktif Ciptakan Pilkada Damai." *Https://Pembaruan.Id/*, Agustus 2024. <https://pembaruan.id/agama/muhammadiyah-tegaskan-komitmen-terlibat-aktif-ciptakan-pilkada-damai/>.
- Arsyad, Edy. "Mantan Penyidik KPK Angkat Bicara Soal Nama Ganjar Yang Disebut-Sebut Di Sidang Kasus Korupsi E-KTP, Profesor Henri Subiakto: Fakta Harus Disampaikan Apa Adanya." *Https://Fajar.Co.Id/*, Oktober 2022. <https://fajar.co.id/2022/10/19/mantan-penyidik-kpk-angkat-bicara-soal-nama-ganjar-yang-disebut-sebut-di-sidang-kasus-korupsi-e-ktp-profesor-henri-subiakto-fakta-harus-disampaikan-apa-adanya/>.
- Astuti, Dinar, and Idham Irwansyah Idrus. "Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia." *Sibatik Jurnal* 2, no. 6 (2023). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888>.
- Boedi Wibowo, Hasdjarjo. "Kolaborasi Kreatif Dengan Prinsip Berbagi Manfaat Secara Etis Melalui Desain: Studi Kasus Program Inovatif Dan Kreatif Melalui Kolaborasi Nusantara (IKKON) – Badan Ekonomi Kreatif." SENADA 2018 STD BALI, n.d.
- Dani Rahayu, Philianto, and Suprayitno. "Kolaborasi Model Pentaahlelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Seigohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya." *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 10, no. 1 (2021). <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/10589/5739>.
- Fadhilah, Khoiril, and Irwansyah. "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi



- Penanggulangannya.” *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia* 9 (2023). <http://dx.doi.org/10.29210/02020344>.
- Faizin, Muhammad. “Inilah 9 Poin Pernyataan Sikap MUI Lampung Tentang Pilkada Serentak 2024 Sumber: <https://Arina.Id/Berita/Ar-1ZEEA/Inilah-9-Poin-Pernyataan-Sikap-Mui-Lampung-Tentang-Pilkada-Serentak-2024>.” <https://Arina.Id/Berita/>, Agustus 2024. Sumber: <https://arina.id/berita/ar-1ZEEA/inilah-9-poin-pernyataan-sikap-mui-lampung-tentang-pilkada-serentak-2024>.
- Farisa, Fitria Chusna. “Tiga Pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 Resmi Ditetapkan, Saatnya Adu Gagasan.” <https://Nasional.Kompas.Com/>, November 14, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/14/05100041/tiga-pasangan-capres-cawapres-pemilu-2024-resmi-ditetapkan-saatnya-adu?page=all>.
- Fauziah, Tifa. “Isi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Link Download PDF.” *Tirto.Id*, January 11, 2023. <https://tirto.id/isi-uu-no-7-tahun-2017-tentang-pemilu-dan-link-download-pdf-gAui>.
- Habibah, Nur. “Membangun Kolaborasi Untuk Mewujudkan Sinergi Di SMP Negeri 3 Kesugihan.” *Jurnal Pendidikan Islam: Dhabit* 3, no. 1 (2023). <https://dhabit.web.id/index.php/dhabit/article/view/62/49>.
- Handayani, Anis. “Gandeng FKUB, UIN RIL Selenggarakan TOT Penguatan Moderasi Beragama.” *Radenintan.Ac.Id*, March 5, 2024. <https://www.radenintan.ac.id/gandeng-fkub-uin-ril-selenggarakan-tot-penguatan-moderasi-beragama/>.
- — —. “Siap Sukseskan Pemilu Berintegritas, UIN Dan DKPP RI Teken MoU.” *Radenintan.Ac.Id*, Mei 2023. <https://kerjasama.radenintan.ac.id/siap-sukseskan-pemilu-berintegritas-uin-dan-dkpp-ri-teken-mou/>.
- Hasanudin, dkk, Restu. “Pendekatan Kolaboratif Terkait Pencegahan Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurnal Lemhanas RI* 11, no. 2 (2023).
- Hawari, Nadirsah, Muntaha Artalim, and Agustam. “Smart Campaign in Local Democracy Practices and Theory of Maqashid Sharia.” *AnalisisL Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022). <https://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v22i2.14336>.



- Hidayat, Taupik. "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023).
- Indah Novitasari, Osbin Samosir. "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024." *JIHHP* 2, no. 3 (2022). <https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/2821/1482>.
- Indrawan, Jerry, dkk. "Ancaman Politik Identitas Bagi Pemilihan Umum Tahun 2024." *Al-Qistahas* 14, no. 1 (2023).
- Lampung, Lampung. "Lepas Mahasiswa PKL UIN Raden Intan, Bawaslu Lampung Berpesan Tetap Selalu Awasi Pemilu 2024." <https://Lampung.Bawaslu.Go.Id5> Feb, February 5, 2024. <https://Lampung.Bawaslu.Go.Id/>, February 5, 2024, 7, <https://lampung.bawaslu.go.id/lepas-mahasiswa-pkl-uin-raden-intan-bawaslu-lampung-berpesan-tetap-selalu-awasi-pemilu-2024/>.
- Lestari, Dwi, and Heni Herawati. "Kolaborasi Masyarakat, Pemerintah, Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Menekan Penyebaran Informasi Hoax/Berita Palsu Menjelang Kampanye Pemilu 2024." *Pendidikan Karakter Unggul* 1, no. 4 (2023).
- Mahdi, Reza. "Kolaborasi Perpustakaan Umum Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Masyarakat." *Media Informasi* 32, no. 2 (2023). <https://journal.ugm.ac.id/v3/MI/article/view/6305/3718>.
- Malik, Asrul Septian. "Bawaslu Lampung Mitigasi Politik Uang." <https://M.Lampost.Co>, n.d.
- Marsa Maya Arjuna, Askana Fikria. "Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024." *Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 1 (2023).
- Muin. Kerjasama Prodi HTN Fakultas Syari'ah. Wawancara, November 29, 2023.
- Muin, Fathul. "Dua Dosen HTN Jadi Narasumber Pendidikan Politik KPU Bandar Lampung." <https://Htn.Syariah.Radenintan.Ac.Id/>, Desember 2022. <https://htn.syariah.radenintan.ac.id/>.
- . "Mahasiswa HTN Ikut Sukseskan Tahapan Pemilu Bersama Bawaslu." <https://Htn.Syariah.Radenintan.Ac.Id/>, April 13, 2023. <https://htn.syariah.radenintan.ac.id/>.



- Purnama, Sugiharto. "BRIN Sebut Politik Identitas Sedang Tidur Di Pemilu 2024." *Https://Lampung.Antaranews.Com/*, January 16, 2024.
- Rindawati, Septi, Bella Astarika, and Sangkut Dwi Wulandari. "Pelatihan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Masa Pandemi." *JKB: Jurnal Kewirausahaan & Bisnis* 3, no. 2 (2021). <https://jurnalunived.com/index.php/JKB/article/view/399/209>.
- Riska, Sabila, and Vita Yuliawati. "Peran Dan Kolaborasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali Dalam Pengendalian Fluktuasi Indeks Demokarasi Indonesia (Idi) Tahun 2019 Sebagai Resolusi Rencana Pemilu 2024 Provinsi Bali." *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023).
- Saleh, Moh.Choirul. *MODUL 01 Konsep, Pengertian, Dan Tujuan Kolaborasi*. 01 6107. Jakarta, 2121. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6107-M1.pdf>.
- Sutringisih, Titik. Kolaboratif Effort Penyelenggara Pemilu dan UIN Raden Intan Lampung. Dialog, Agustus 2024.
- Tamri. Kolaboratif Effort Penyelenggara Pemilu dan UIN Raden Intan Lampung. Dialog, July 26, 2024.
- Warini, Sisin, Yasnita Nurul Hidayat, and Darul Ilmi. "Teori Belajar Sosial Dalam Pembelajaran." *ANTHOR:Education and Learning Journal* 2, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.31004/anthor.v2i4.181>.
- Wiguna, Tama. "Potensi Politik Identitas Bayangi Pemilu 2024 Di Lampung." *Https://Lampung.Idntimes.Com*, November 7, 2024. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/potensi-politik-identitas-bayangi-pemilu-2024-di-lampung>.
- Wijayanto Said, Ridwan. "Fenomena Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia." *Citizen* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.53866/jimi.v3i1.233>.
- Yudha, Gesit. "Penarikan Mahasiswa PKL Program Studi Pemikiran Politik Islam Pada KPU Kota Bandar Lampung." *Https://Ppi.Ushuluddin.Radenintan.Ac.Id/*, March 2, 2023. <https://ppi.usnuluddin.radenintan.ac.id/2023/03/02/penarikan-mahasiswa-pkl-program-studi-pemikiran-politik-islam-pada-kpu-provinsi-lampung/>.
- — —. "Perkuat Tridharma Perguruan Tinggi, FUSA Jalin Kerjasama Dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran."



<https://Ppi.Ushuluddin.Radenintan.Ac.Id/>, March 7, 2023.
<https://ppi.usnuluddin.radenintan.ac.id/2023/03/07/perkuat-tridharma-perguruan-tinggi-fusa-jalin-kerjasama-dengan-bawaslu-kabupaten-pesawaran/>.

